

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat ini dirasakan sejak berlakunya otonomi daerah dimana daerah kabupaten atau kota dituntut untuk mampu membiayai seluruh pendanaan daerahnya melalui hasil dari pengolaan atau hasil dari sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber dana penerimaan yang cukup besar kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah adalah pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri untuk meningkatkan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri (Ersita dan Elim 2016:890).

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien sangat bergantung kepada tersedianya sumber daya pendukungnya. Sumber daya ini nanti akan dapat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah baik yang bersumber dari pemerintah pusat, maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Adapun sumberdaya yang berasal dari pemerintah pusat antara lain, kebijaksanaan dalam pungutan pajak dan retribusi daerah yang akan berdampak terhadap PAD,

serta sumbangan dan bantuan pusat yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap APBD (Nurlan, 2009:17).

Diharapkan dengan adanya otonomi yang diberikan kepada kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah akan diikuti oleh peraturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Chabib dan Heru, 2010:27).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan hukum dari penetapan perpajakan daerah adalah Peraturan Daerah (PERDA) yang disahkan oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Pajak daerah harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan badan legislatif), tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biaya (Rahardjo, 2011:100).

Seperti halnya Kota dan Kabupaten di Provinsi lainnya, Kota Pangkalpinang sebagai ibukota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga diberi hak dan wewenang untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskalnya. Penerimaan pajak daerah sebagai komponen penerimaan terbesar PAD sendiri tidak terlepas dari bantuan pemerintah pusat. Penyumbang terbesar dari pajak daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2012 sampai dengan

tahun 2016 berasal dari Pajak Penerangan Jalan diikuti Pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seperti halnya Kota Pangkalpinang yang termasuk sebagai Ibukota Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga diberi wewenang untuk mengurus otonomi daerahnya terlepas dari bantuan pemerintah pusat. Kabupaten Bangka Selatan terus menggali potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya untuk terus meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerahnya. Di Kabupaten Bangka Selatan sendiri Penyumbang pajak daerah terbesar selama rentang tahun 2012-2016 masih di dominasi oleh Pajak BPHTB dan diikuti oleh pajak daerah lainnya. Pemerintah daerah diberi wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Berikut ini merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2012-2016.

Tabel I.1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota pangkalpinang dan Bangka Selatan tahun 2012-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang		Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	65.094.072.000	65.970.229.685	20.018.802.463	20.854.440.233
2013	81.554.926.490	92.106.752.248	22.199.112.407	21.010.003.592
2014	111.294.287.826	113.817.278.385	30.357.519.634	28.907.044.191
2015	135.492.246.486	135.305.782.559	39.397.867.381	38.734.330.399
2016	129.898.863.245	136.257.398.973	58.344.896.378	46.255.959.380

Sumber: BAKUDA 2018

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa dari masing-masing target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah baik di Kota Pangkalpinang maupun Kabupaten Bangka selatan yaitu di Kota Pangkalpinang untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk di Kabupaten Bangka Selatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya mengalami peningkatan terlihat dari tahun 2013-2016 itu dikarenakan adanya perubahan APBD-P. Perubahan APBD terjadi karena adanya perubahan rencana keuangan sehingga berdampak terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran. Dilihat dari masing-masing realisasi penerimaannya pelaksanaan otonominya dinilai cukup maksimal, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan memerlukan dana yang cukup besar dalam pembiayaan sistem pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya masing-masing. Salah satu sumber penerimaan PAD yang cukup untuk menambah pembiayaan baik di Kota Pangkalpinang dan Bangka Selatan adalah Pajak Daerah. Penerimaan untuk pajak daerah di Kota Pangkalpinang terus melampaui target dari tahun 2012 sampai tahun 2016 meskipun terlihat dari tahun 2015 belum mencapai target penerimaan pajak karena adanya perubahan APBD Perubahan (APBD-P 2015) begitu pula untuk di Kabupaten Bangka Selatan penerimaan pajak daerah selalu melebihi target meskipun pada tahun 2014-2016 belum mencapai target tetapi secara keseluruhan tetap mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut.

Tabel I.2 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pangkalpinang Dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2016

Tahun	Kota Pangkalpinang		Kabupaten Bangka selatan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	21.261.890.008	27.858.720.433	3.459.896.000	4.310.977.497
2013	34.220.000.000	47.978.125.915	4.663.663.198	5.909.496.811
2014	45.175.000.000	52.846.816.661	9.012.163.634	8.945.377.008
2015	60.600.000.000	57.078.721.262	13.674.976.048	10.521.067.245
2016	53.785.000.000	65.953.671.740	22.840.000.000	14.795.638.866

Sumber : BAKUDA 2018

Berdasarkan Tabel I.2 terlihat yaitu realisasi dari penerimaan pajak daerah di Kota Pangkalpinang dari tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan adanya perubahan APBD Perubahan pada tahun 2015 dan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan dari target pajak daerah yang ditetapkan. Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan dari target pajak daerah yang ditetapkan dan pada tahun 2014-2016 realisasi belum mencapai target ini disebabkan karena adanya perubahan APBD Perubahan di Kabupaten Bangka Selatan.

Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi khususnya dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak daerah, Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi yang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban, pertumbuhan usaha yang sangat lemah, pemungutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal, banyak masyarakat yang melakukan transaksi tidak melaporkan kegiatan transaksi tersebut kepada petugas, pengaruh kondisi alam, dan kurangnya fasilitas yang memadai

menimbulkan ketertarikan untuk meneliti rasio efektivitas pajak daerah dan kontribusinya pada PAD. Dimana dalam penerimaan pajak daerah dari kedua daerah yang sama-sama sedang meningkatkan pertumbuhannya ini, apakah pelaksanaannya sudah dilakukan secara efektif dan juga serta melihat apakah terdapat perbedaan dalam efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada PAD.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan, dimana pendapatan tersebut dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Jika dilihat dari realisasi Kota Pangkalpinang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan. Pada Kabupaten Bangka Selatan jika dilihat dari realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami Peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa dari sektor pajak daerah, memberikan pemasukan yang berbeda-beda, karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Analisis Perbandingan Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2016?
2. Bagaimana gambaran tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Daerah pada PAD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2016?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016?
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016?

1.3 Batasan Penelitian

Pada saat melakukan penelitian, peneliti membahas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan menggunakan data laporan anggaran pendapatan asli daerah, serta penerimaan pajak daerahnya dari tahun 2012-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis gambaran tingkat Efektifitas penerimaan Pajak Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016.
2. Untuk menganalisis gambaran tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012- 2016.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat Efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat Kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012 -2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pembelajaran untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah mengenai analisis efektifitas pajak daerah, serta kontribusi pajak daerah serta pendapatan asli daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupten Bangka Selatan yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya serta untuk dapat lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya.

3. Manfaat Akademisi

Manfaat akademis yang diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pembangunan Pemerintah Daerah, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang analisis Kinerja Keuangan Daerah.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai pembahasan yang terdapat pada setiap bab dalam skripsi ini agar dapat memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi dari penulisan skripsi dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan karya ilmiah penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori berisi tentang konsep-konsep yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metodologi penelitian berisi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan penelitian berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan interpretasi data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**